

**ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DI MEDIA
TRIBUN MEDAN ONLINE**

TUGAS AKHIR

Oleh:

IKHWAN AZIZI PURBA
2103110128

**Program Studi Ilmu Komunikasi
Konsentrasi Jurnalistik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tugas Akhir ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tugas Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama Lengkap : Ikhwan Azizi Purba
NPM : 2103110128
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Pada Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
Waktu : Pukul 08:00 WIB s/d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom (.....)

PENGUJI II : AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom (.....)

PENGUJI III : Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom (.....)

PANITIA PENGUJI

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP
Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom



Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan tugas akhir sehingga naskah tugas ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian tugas akhir, oleh:

Nama Lengkap : IKHWAN AZIZI PURBA
NPM : 2103110128
Program Studi : ILMU KOMUNIKASI
Judul Skripsi : ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN
PRESIDENTIAL THRESHOLD 20% DI MEDIA
TRIBUN MEDAN ONLINE

Medan, 24 Maret 2025

Pembimbing

Dr. RIBUT PRADI, S.Sos, M.I.Kom
NIDN: 0120057303

Disetujui Oleh
Ketua Program Studi

AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom
NIDN: 0127048401

Dekan

Assoc. Prof. Dr., ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP
NIDN: 0030017402

PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, **Ikhwan Azizi Purba**, NPM 2103110128, menyatakan dengan sungguh-sungguh:

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau mem plagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa tugas akhir ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi:

1. Tugas akhir saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian tugas akhir saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 7 Mei2025

Yang Menyatakan,



Ikhwan Azizi Purba

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamin. Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, rahmat, serta karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* 20% DI MEDIA TRIBUN MEDAN ONLINE.** Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata (S1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu berkat doa dan dukungan yang diberikan oleh kedua orang tua penulis yaitu Ayahanda **Surya Purba S.E** dan Ibunda **Yusriana Nst. S.Pd** yang sangat penulis cintai dan sayangi yang selalu memanjatkan doa yang tak pernah putus untuk kesuksesan anaknya. Serta Saudara penulis yaitu **Utari Suryana Putri Purba S.T** dan **Alhafizh Yusni S.T** yang telah memberikan semangat, dukungan, dan juga motivasi selama mengerjakan skripsi ini.

Penulis juga menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof . Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.SP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Abrar Adhani, S.Sos., M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Dra. Hj. Yurisna Tanjung, M.AP selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Akhyar Anshori, S.Sos., M.I.Kom selaku Ketua Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Faizal Hamzah Lubis., S.Sos., M.I.Kom selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Ribut Priadi, S.Sos., M.I.Kom. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah mengorbankan waktu dan pikirannya untuk memberikan pengarahan dan membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Dosen dan staf pengajar Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membekali penulis ilmu pengetahuan.
9. Kekasih tercinta penulis Hayrasyirah Ryazinharwa yang senantiasa memberikan support, informasi, dan saran yang baik bahkan meluangkan

waktunya untuk membantu penulis sehingga skripsi ini berjalan dengan lancar

10. Teman-teman penulis serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas segala kebersamaan, bantuan, dan hubungan selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian skripsi ini, Oleh karena itu penulis sangat menerima masukan, kritikan, dan saran tentunya sangat diterima yang bersifat membangun demi perubahan yang lebih baik lagi dari skripsi ini sehingga berguna dalam penyempurnaan skripsi penulis. Penulis juga berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi penulis khususnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 21 Maret 2025

Ikhwan Azizi Purba
2103110128

ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* 20% DI MEDIA TRIBUN MEDAN ONLINE

IKHWAN AZIZI PURBA
2103110128

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media Tribun Medan Online membingkai pemberitaan terkait penghapusan *Presidential Threshold* 20% yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi kualitatif model Krippendorff, dengan fokus pada struktur berita, pola pemberitaan, gaya bahasa, dan framing media dalam lima berita yang dipublikasikan pada Januari 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tribun Medan Online lebih menonjolkan aspek legalitas putusan MK, dengan menekankan bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden merupakan langkah untuk memperkuat demokrasi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi seluruh partai politik dalam proses pemilu. Dari segi framing, pemberitaan media cenderung mendukung putusan MK dengan menyajikan sudut pandang yang menguatkan narasi bahwa aturan *Presidential Threshold* sebelumnya membatasi hak konstitusional partai politik. Dampak negatif dari penghapusan aturan ini, seperti potensi fragmentasi politik dan instabilitas dalam pencalonan presiden, hanya disebutkan secara terbatas. Dalam aspek gaya bahasa, pemberitaan menggunakan diksi normatif dan informatif dengan penekanan pada istilah seperti keadilan, moralitas, demokrasi, dan stabilitas politik. Nada pemberitaan cenderung resmi dan netral, dengan penggunaan kutipan dari tokoh politik dan akademisi untuk memperkuat validitas informasi yang disampaikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa framing media masih lebih berorientasi pada perspektif elite politik, dengan minimnya representasi opini publik dalam wacana yang dibangun oleh media. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar media lebih inklusif dalam menyajikan berbagai perspektif, termasuk pendapat masyarakat umum, guna menciptakan pemberitaan yang lebih seimbang dan objektif.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Analisis Isi, Framing Media, Tribun Medan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Pembatasan Masalah	10
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.5 Manfaat Penelitian ini antara lain	10
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB II URAIAN TEORITIS	13
2.1 Komunikasi	13
2.2 Berita	15
2.3 Media online	18
2.4 Teori agenda setting	21
2.5 Konstruksi realitas media	23
2.6 <i>Presidential Threshold</i>	24
2.7 Analisis isi Model Krippendorff	27
2.8 Anggapan Dasar	30
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Kerangka konsep	34
3.3 Definisi konsep	35
3.4 Kategorisasi penelitian	35
3.5 Teknik pengumpulan data	36
3.6 Teknik analisis data	37
3.7 Lokasi dan waktu penelitian	39
BAB IV HASIL PENELITIAN	40
4.1 Hasil penelitian	40
4.2 Pembahasan	44

BAB V PENUTUP	63
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian.....	35
Tabel 4.1 : Keterangan berita.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Presidential Threshold adalah ketentuan mengenai ambang batas dukungan dari DPR, baik berdasarkan jumlah suara (*ballot*) maupun jumlah kursi (*seat*), yang harus dicapai oleh partai politik peserta pemilu untuk dapat mengajukan calon Presiden, baik secara mandiri maupun melalui koalisi dengan partai politik lain.(Majid et al., 2023).

Istilah "*Presidential Threshold*" berasal dari bahasa Inggris. Istilah ini terdiri dari dua kata: "*presidential*" dan "*threshold*". Menurut *Oxford Dictionary*, kata "*presidential*" secara etimologis diartikan sebagai "berkaitan dengan presiden atau kepresidenan." 1Istilah ini juga dapat dianggap merujuk pada "presiden". Istilah "*threshold*" memiliki arti "ambang pintu"; "pintu masuk ke rumah atau gedung"; "setiap tempat atau titik masuk atau awal.(Abdurrohman, 2018).

Presidential Threshold merupakan ketentuan tambahan mengenai pengaturan tentang syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 6A ayat (2) yang menjelaskan bahwa “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.” Dapat dipahami secara tekstualis, bahwa dengan adanya pasal tersebut memberikan ruang terbuka kepada semua partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Sebab, partai politik merupakan pilar demokrasi dan

penghubung antara pemerintahan negara (*the state*) dengan warga negaranya (*the citizens*). Syarat ambang batas juga dinilai oleh beberapa kalangan sebagai penguatan dari sistem presidensial yang diterapkan di Indonesia. (Baskoro & Orang, 2017).

Presidential Threshold dimaknai sebagai ambang batas perolehan suara calon presiden dan atau wakil presiden yang harus diperoleh oleh partai politik dalam pemilu pada sistem politik Indonesia saat ini adalah salah satu bentuk pelemahan demokrasi dan penyimpangan konstitusi. Sejak Indonesia berdiri konsep ini tidak pernah dihidupkan bahkan di dalam UUD 1945 sendiri tidak pernah ada. Dalam sejarahnya partai politik hidup sebagai multipartai dengan membebaskan rakyat mencalonkan dan memilih presidennya, entah itu dalam pemilu langsung ataupun tidak langsung. Kondisi *Presidential Threshold* menjadikan nilai-nilai hak dipilih dan memilih dibatasi, sekaligus hanya memberikan ruang pada pemilik modal dan pemegang kekuasaan. Nilai-nilai kedaulatan sebagaimana Pancasila dan Konstitusi menjadi konsep yang semakin tidak tersentuh. Mahkamah konstitusi sendiri dalam putusannya beberapa kali terkait *Presidential Threshold* seakan tidak mampu lagi mendengarkan kebutuhan rakyat yang sebenarnya adalah bagian dari nilai-nilai konstitusi itu sendiri. Ditambah lagi *Presidential Threshold* sebesar 20 persen suara DPR atau persen suara nasional sama saja dengan tidak memberikan ruang pada partai-partai kecil bahkan seakan memaksa partai

kecil untuk memilih bergabung atau tidak menjadi peserta pencalonan presiden. (Abra, 2021).

Isu mengenai *Presidential Threshold* 20% pertama kali diusulkan oleh pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2008 melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Tujuan utama dari pengusulan aturan ini adalah untuk menciptakan sebuah sistem pemilihan presiden yang lebih terstruktur, mengurangi fragmentasi politik, dan memastikan stabilitas pemerintahan. Salah satu alasan utama dari usulan ini adalah untuk mempersempit kemungkinan munculnya banyak calon presiden yang dapat memperlemah konsolidasi politik dan mengarah pada ketidakstabilan pemerintahan pasca-pemilu.

Dalam proses legislasi tersebut, beberapa partai politik besar turut memberikan dukungan signifikan terhadap pengesahan aturan *Presidential Threshold*. Partai Demokrat, yang pada saat itu dipimpin oleh Presiden SBY, merupakan partai utama yang mendukung inisiatif ini, mengingat posisi partainya sebagai kekuatan politik dominan di pemerintahan. Selain itu, Partai Golkar, sebagai salah satu partai terbesar di Indonesia, juga memberikan dukungan penuh terhadap aturan ini, dengan alasan untuk memperkuat koalisi pemerintahan dan mencegah pemecah belahan politik yang berlebihan.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), meskipun secara tradisional berposisi sebagai oposisi, juga tidak menolak usulan tersebut, dengan pertimbangan bahwa ambang batas ini akan memberikan ruang bagi pemilihan presiden yang lebih terorganisir dan memperkecil peluang bagi calon presiden yang tidak memiliki dukungan signifikan. Begitu pula dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Amanat Nasional (PAN), yang meskipun lebih kecil dibandingkan dua partai besar tersebut, juga menganggap bahwa adanya *Presidential Threshold* akan memperkuat posisi partai mereka dalam koalisi besar dan mencegah terciptanya partai-partai politik yang terlalu banyak dalam sistem pemilu.

Secara keseluruhan, dukungan dari partai-partai besar ini menunjukkan adanya konsensus politik yang cukup luas di kalangan partai-partai yang memiliki representasi signifikan di parlemen untuk menerapkan aturan ambang batas pencalonan presiden. Pendekatan ini didorong oleh keinginan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih stabil dan efektif, sekaligus mencegah potensi fragmentasi yang dapat merugikan integritas sistem politik dan pemerintahan Indonesia.

Presidential Threshold 20% ini sudah berkali kali di gugat oleh beberapa pihak di tahun 2014, 2019, dan terakhir di tahun 2024. Pada saat tahun 2014 beberapa pihak terkait yang menggugat adalah Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) PKPI, yang pada saat itu merupakan partai kecil dan tidak memiliki kursi yang cukup untuk mencalonkan pasangan presiden sendiri, menggugat ketentuan ini karena mereka merasa

aturan tersebut membatasi hak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Partai Bulan Bintang (PBB) Partai PBB, yang juga merupakan partai kecil, mengajukan gugatan dengan alasan yang sama, yakni *Presidential Threshold* mengurangi peluang mereka untuk mencalonkan kandidat presiden yang memiliki basis dukungan dari rakyat. Tokoh Masyarakat dan Aktivis Demokrasi Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis pro-demokrasi juga mengajukan gugatan. Mereka berpendapat bahwa *Presidential Threshold* 20% bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang seharusnya memberi ruang yang lebih luas bagi calon-calon alternatif dalam pemilihan umum. Gugatan ini berfokus pada pembatasan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih, serta potensi oligarki politik yang dapat terjadi akibat dominasi partai besar dalam pemilu presiden.

Pada Pemilu di tahun 2019 beberapa pihak melakukan gugatan kembali terhadap aturan *Presidential Threshold* 2019 Pada Pemilu 2019, beberapa pihak mengajukan gugatan terhadap *Presidential Threshold* 20% ke Mahkamah Konstitusi (MK). Para penggugat berargumen bahwa ketentuan ini menghambat munculnya calon presiden alternatif dan mempersempit ruang bagi partai-partai kecil untuk berkompetisi secara adil. Partai Bulan Bintang (PBB) menggugat *Presidential Threshold* 20% pada Pemilu 2019 karena merasa aturan ini menghalangi mereka untuk mencalonkan pasangan presiden mereka sendiri. Sebagai partai kecil yang tidak memiliki kursi cukup di DPR, PBB berpendapat bahwa aturan ini

melanggar hak konstitusional mereka untuk ikut serta dalam proses pemilihan presiden. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), yang juga termasuk dalam partai kecil yang tidak memiliki cukup kursi di DPR, menggugat *Presidential Threshold* 20% pada 2019 dengan alasan yang serupa. Mereka merasa aturan ini menghalangi aspirasi politik mereka dan membatasi hak mereka untuk berkompetisi dalam pemilu presiden. Tokoh Masyarakat dan Aktivis Demokrasi Beberapa tokoh masyarakat dan aktivis pro-demokrasi juga turut menggugat *Presidential Threshold* 20% pada 2019. Mereka menganggap aturan ini bertentangan dengan prinsip demokrasi yang menjamin hak rakyat untuk memilih dan dipilih. Pada akhirnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak gugatan-gugatan tersebut dan mempertahankan aturan *Presidential Threshold* 20% dalam Pemilu 2019.

Beberapa pihak juga pernah mengajukan gugatan terhadap *Presidential Threshold* 20% di tahun 2020 sampai 2024 antara lain: Ferry Yuliantono, yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, mengajukan gugatan pada Desember 2021 sebagai warga negara yang merasa dirugikan oleh ketentuan *Presidential Threshold*. Yuliantono berpendapat bahwa aturan ini menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan partai politik untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, juga mengajukan gugatan serupa pada Desember 2021. Dalam gugatan tersebut, Gatot menekankan bahwa *Presidential Threshold* 20% membatasi partai-partai

kecil dan individu untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan presiden, yang berpotensi merugikan keberagaman dalam sistem politik Indonesia. Fachrul Razi dan Bustami Zainudin, keduanya merupakan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, juga mengajukan gugatan terhadap ketentuan ini pada Desember 2021. Mereka berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden yang tinggi bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diamanatkan oleh konstitusi, yang seharusnya memberi ruang bagi lebih banyak calon untuk berkompetisi. Enam Partai Politik Pada Februari 2022, enam partai politik kecil yang tidak memiliki kursi yang cukup di DPR mengajukan gugatan terhadap *Presidential Threshold* 20%. Partai-partai ini meliputi: Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP) Partai Bulan Bintang (PBB) Partai Hanura Partai Perindo Partai Garuda Mereka berpendapat bahwa ambang batas 20% membatasi hak mereka untuk mencalonkan pasangan presiden, dan dengan demikian mengurangi representasi politik serta pluralisme dalam pemilu.

Isu ini kembali mendapat sorotan publik setelah muncul berbagai usulan untuk menghapuskan *Presidential Threshold* 20% pada pelaksanaan Pemilu. Pendukung penghapusan berargumen aturan ini menciptakan oligarki politik, mempersempit kompetisi, dan menghalangi partisipasi calon independen yang potensial. Sebaliknya, pendukung kebijakan PT berpendapat bahwa aturan ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas pemerintahan dengan membatasi jumlah kandidat yang bersaing.

Isu Penghapusan *Presidential Threshold* (PT) sebesar 20% pada tanggal 2 Januari 2025 melalui putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menjadi salah satu isu kontroversial yang mencuat dalam diskursus politik di Indonesia saat ini. *Presidential Threshold* merupakan syarat minimal perolehan suara partai atau gabungan partai politik dalam pemilu legislatif untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun, aturan ini kerap memicu polemik karena dianggap membatasi hak politik dan mengurangi keterwakilan demokratis.

Media massa, sebagai salah satu pilar demokrasi, memiliki peran yang sangat penting dalam menyampaikan informasi, membentuk opini publik, dan menjadi sarana pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam konteks demokrasi Indonesia, media massa tidak hanya berfungsi sebagai penyedia informasi, tetapi juga sebagai arena di mana berbagai pandangan dan kepentingan publik diperdebatkan. Salah satu isu strategis yang banyak menjadi sorotan media adalah polemik mengenai *Presidential Threshold*(PT), khususnya wacana penghapusan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20%. Kebijakan *Presidential Threshold* sering kali menuai kritik karena dianggap tidak sejalan dengan prinsip demokrasi yang inklusif, menghalangi kompetisi politik yang sehat, dan mempersempit pilihan masyarakat dalam proses demokrasi.

Sebagai salah satu portal berita lokal yang memiliki jangkauan luas di wilayah Sumatera Utara, Tribun Medan Online berperan aktif dalam

memberitakan berbagai isu politik, termasuk polemik mengenai penghapusan *Presidential Threshold* 20%. Media ini tidak hanya menjadi sumber informasi bagi masyarakat di tingkat lokal, tetapi juga menjadi representasi bagaimana isu-isu nasional diterjemahkan dan dipahami di tingkat daerah. Dalam konteks ini, pemberitaan Tribun Medan Online mengenai penghapusan *Presidential Threshold* menjadi penting untuk dikaji, karena media memiliki kekuatan untuk membingkai isu tersebut sesuai dengan agenda tertentu, yang pada akhirnya dapat memengaruhi persepsi dan opini masyarakat.

Analisis pemberitaan media, khususnya melalui metode analisis isi, menjadi pendekatan yang relevan untuk memahami bagaimana Tribun Medan Online membingkai isu ini. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola pemberitaan, bias, serta kecenderungan tertentu dalam peliputan isu. Misalnya, apakah pemberitaan Tribun Medan Online cenderung netral, mendukung, atau menolak wacana penghapusan *Presidential Threshold*? Apakah terdapat narasi tertentu yang dominan dalam pemberitaan, seperti menonjolkan argumen tertentu atau meminggirkan pandangan lain?

Melalui metode analisis isi model Krippendorff, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang komprehensif mengenai pola pemberitaan yang dilakukan oleh Tribun Medan Online, khususnya dalam membingkai isu penghapusan *Presidential Threshold* 20%.

1.2 Pembatasan Masalah

Penelitian ini terbatas pada pemberitaan yang dipublikasikan oleh Tribun Medan Online, dengan menggunakan metode Analisis isi model Krippendorff. Apakah Tribun Medan Online mendukung atau mengkritik kebijakan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah yang telah di uraikan sebelumnya, Penelitian ini diformulasikan ke dalam rumusan masalah Bagaimana Analisis isi model Krippendorff yang dilakukan oleh Tribun Medan Online dalam memberitakan isu penghapusan *Presidential Threshold 20%*?

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui bagaimana Analisis isi model Krippendorff yang dilakukan Tribun Medan Online dalam memberitakan isu penghapusan *Presidential Threshold 20%*

1.5 Manfaat Penelitian ini antara lain :

a) Manfaat Teoritis

Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah wawasan tentang teori framing dalam pemberitaan media, khususnya mengenai isu-isu politik seperti penghapusan *Presidential Threshold 20%*.

b) Manfaat Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan wawasan dan literatur tentang teori framing dalam pemberitaan media, khususnya dalam konteks isu-isu politik seperti penghapusan *Presidential Threshold* 20%.

c) Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi praktisi media dalam menyusun pemberitaan yang lebih objektif dan bertanggung jawab, khususnya terkait isu-isu politik seperti penghapusan *Presidential Threshold* 20%.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, serta sistematika penulisan.

BAB II URAIAN TEORITIS

Berisi bab mengenai kerangka teori, humor lengkap dengan ruang lingkupnya, yaitu pengertian, tujuan dan fungsi humor, unsur-unsur humor. Dakwah beserta lingkupnya yaitu, pengertian, unsur, objek, tujuan, dan bentuk dakwah. Ruang lingkup media online meliputi, pengertian media online dan youtube.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjabaran mengenai jenis penelitian terkait, sumber data, teknik analisis data yang kemudian disusun untuk mencari jawaban dari rumusan masalah pada penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang dijabarkan berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan di lapangan.

BAB V PENUTUP

Mencakup kesimpulan, saran-saran, kata penutup, serta lampiran-lampiran yang penting bagi penelitian ini.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Komunikasi

Kata "komunikasi" berasal dari bahasa Latin dan Inggris. Dalam bahasa Latin, istilah-istilah seperti "*communico*", "*communis*", "*communicare*", "*communicatio*", dan memiliki arti "membuat sesuatu yang identik" atau "membuat sesuatu yang serupa." Dari beberapa istilah tersebut, "*communis*" menjadi kata yang paling sering digunakan untuk merujuk pada makna "komunikasi" dan menjadi akar dari berbagai kata Latin lain yang memiliki arti terkait. Istilah ini menunjukkan bahwa dalam konteks komunikasi, ide, makna, atau pesan diterima secara kolektif oleh para pihak yang terlibat.

Komunikasi dapat didefinisikan sebagai interaksi antara individu maupun antara individu dengan lingkungannya. Dalam proses komunikasi, ketika dua orang atau lebih berinteraksi, terjadi saling memengaruhi antara ide, pandangan, keyakinan, dan sikap mereka. Proses ini memungkinkan pertukaran informasi yang bersifat dinamis dan berlangsung melalui berbagai saluran komunikasi. (B Purba, S Gaspersz, M Bisyrri, A Putriana, 2020)

Berbagai cara digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, seperti berbicara, menggunakan bahasa tubuh, tanda dan simbol, ekspresi wajah, serta metode lainnya. Meskipun terdapat banyak bentuk komunikasi, bahasa yang telah berkembang selama beberapa dekade

terakhir menjadi alat komunikasi yang paling efektif. Bahasa memungkinkan penyampaian pesan yang lebih terstruktur dan dipahami secara luas oleh banyak pihak.

Komunikasi yang efektif, menurut Uripni (2003), adalah proses komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap (*attitude change*) pada individu yang terlibat di dalamnya. Tujuan utama dari komunikasi efektif adalah mempermudah pemahaman terhadap pesan yang disampaikan antara pengirim dan penerima. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan bahasa yang lebih jelas, lengkap, serta pengiriman umpan balik yang seimbang. Selain itu, komunikasi efektif juga melibatkan kemampuan untuk memanfaatkan bahasa nonverbal secara tepat dan baik.

Bentuk dan karakteristik komunikasi efektif mencakup dua aspek utama, yaitu komunikasi verbal yang efektif dan komunikasi nonverbal yang efektif. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan pesan tersampaikan dengan baik dan dipahami secara maksimal oleh semua pihak yang terlibat. (Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Selain itu, dalam konteks komunikasi tertulis, penulis menggunakan berbagai teknik untuk menyampaikan informasi dengan efektif. Teknik-teknik tersebut mencakup pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang jelas, serta penyusunan ide yang sistematis. Dengan demikian, komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis, memainkan peran yang sangat penting dalam menjembatani pemahaman di antara individu dan kelompok dalam berbagai konteks sosial

Komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya. Melalui komunikasi, manusia dapat berbagi informasi, gagasan, dan pemahaman yang memungkinkan pengetahuan terus berkembang seiring waktu. Lebih dari sekadar proses penyampaian pesan, komunikasi juga berkontribusi pada pengembangan struktur sosial yang saling bergantung, menciptakan hubungan yang kompleks dan dinamis di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat.

2.2 Berita

Berita merupakan salah satu sarana penting dalam menyampaikan informasi kepada khalayak luas. Informasi ini disebarluaskan melalui media massa, baik dalam bentuk media elektronik, seperti televisi, radio, dan internet, maupun media cetak, seperti surat kabar, majalah, dan tabloid. Kehadiran media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam memberikan akses terhadap informasi yang relevan, terkini, dan bermanfaat. Pada masa itu, media massa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai medium untuk membangun wawasan dan memengaruhi opini publik. (Effendy et al., 2023)

Konten yang disajikan oleh media massa umumnya mencakup tiga tujuan utama, yaitu menyampaikan informasi, memberikan edukasi, dan menghadirkan hiburan. Ketiga tujuan ini mencerminkan fungsi utama media massa sebagai penyampai pesan yang beragam kepada masyarakat.

Berita yang berfokus pada penyampaian informasi biasanya berkaitan dengan peristiwa atau fakta-fakta aktual yang terjadi di berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sementara itu, berita yang berorientasi pada pendidikan dan pengetahuan bertujuan untuk memperluas wawasan masyarakat melalui penyajian informasi yang mendidik dan berbasis keilmuan. Di sisi lain, berita yang menekankan hiburan hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan konten yang bersifat ringan, menyenangkan, dan mampu mengurangi kejenuhan.

Dengan demikian, media massa pada masa itu tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga alat yang berperan dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap berbagai isu. Hal ini menunjukkan bahwa berita memiliki peran strategis dalam kehidupan sosial, karena mampu menyampaikan pesan yang tidak hanya informatif, tetapi juga edukatif dan rekreatif. Oleh karena itu, kualitas berita yang disajikan sangat bergantung pada bagaimana media massa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyedia informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

Berita dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan isi, sifat, dan cara penyampaiannya. Berikut adalah beberapa jenis berita yang umum :

2.2.1 Berdasarkan isi

- a) Berita Politik Berita yang membahas isu-isu politik, seperti kebijakan pemerintah, pemilu, dan peraturan perundang-undangan.
- b) Berita Ekonomi Berita yang berkaitan dengan kondisi ekonomi, bisnis, perdagangan, dan keuangan.
- c) Berita Hukum dan Kriminal Berita mengenai kasus hukum, keputusan pengadilan, dan tindak kriminal.
- d) Berita Olahraga Berita yang membahas kompetisi, prestasi atlet, serta perkembangan di dunia olahraga.
- e) Berita Hiburan Berita seputar industri hiburan, seperti film, musik, dan selebriti.
- f) Berita Internasional Berita yang melaporkan kejadian penting dari luar negeri yang berpengaruh secara global.

2.2.2 Berdasarkan sifat penyampaian

- a) Berita Langsung (*Straight News*) Berita yang disajikan secara langsung dan objektif tanpa opini penulis. Berita ini menitikberatkan pada fakta dan umumnya berbentuk hard news.
- b) Berita Mendalam (*Depth News*) Berita yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga menelusuri latar belakang serta dampak dari suatu peristiwa.

- c) Berita Investigasi Berita yang diperoleh melalui proses investigasi mendalam, sering kali mengungkap kasus-kasus tersembunyi atau yang memiliki dampak besar.
- d) Berita Opini (*Editorial/Feature News*) Berita yang mengandung opini atau analisis mendalam terhadap suatu isu, biasanya ditulis dalam bentuk artikel opini atau kolom analisis.

2.2.3 Berdasarkan cara penyajian

- a) *Hard News* Berita penting dan aktual yang harus segera disampaikan, seperti bencana alam, keputusan politik, atau peristiwa besar lainnya.
- b) *Soft News* Berita yang lebih ringan dan tidak bersifat mendesak, seperti berita gaya hidup, tren, atau kisah inspiratif.
- c) *Live News* (Berita Siaran Langsung) Berita yang disiarkan secara real-time, biasanya dalam bentuk liputan langsung dari tempat kejadian.

2.3 Media online

Media online, merupakan salah satu bentuk komunikasi yang menggunakan perangkat yang terhubung dengan internet. Media online dikategorikan sebagai salah satu jenis media tersendiri yang memanfaatkan

perangkat komputer dan keterampilan pemrograman komputer untuk memperoleh berita atau informasi. (Indriyani, 2020)

Media online merupakan salah satu sarana yang saat ini banyak digunakan sebagai alat untuk memperoleh informasi dan hiburan. Keberadaan media online tidak dapat dipisahkan dari internet, karena internet menjadi elemen utama yang mendukung kinerja media online tersebut. Dalam hal ini, kemunculan teknologi *World Wide Web* (WWW) menjadi salah satu perkembangan signifikan yang mendukung penyebaran informasi secara digital. Teknologi web ini tidak hanya menarik perhatian pihak-pihak tertentu seperti kalangan profesional, tetapi juga memikat perhatian masyarakat awam.

Media dapat dimaknai sebagai wadah yang tidak hanya menyajikan gambaran peristiwa, tetapi juga membangun imajinasi tentang kehidupan ideal dalam masyarakat. Lebih dari sekadar alat untuk menyebarkan informasi, media berfungsi sebagai aktor sekaligus arena tempat terjadinya kontestasi dan negosiasi berbagai kepentingan. Media memainkan peran penting sebagai kekuatan sosial-politik yang melibatkan berbagai pihak, seperti korporasi, birokrasi, partai politik, dan elemen lain yang saling berinteraksi dalam dinamika sosial, politik, dan ekonomi. (Hajiza & Santoso, 2020)

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, penggunaan media online semakin mempermudah masyarakat dalam memenuhi kebutuhan informasi mereka. Hanya dengan mengakses

perangkat seperti komputer atau smartphone yang terhubung dengan internet, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tanpa batasan waktu atau tempat. Internet memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memiliki akses penuh terhadap berbagai jenis informasi, baik berita terkini, hiburan, maupun sumber-sumber edukasi. Dengan kemudahan tersebut, pengguna tidak perlu lagi menghadapi hambatan fisik seperti harus mengunjungi lokasi tertentu untuk mendapatkan informasi tertentu.

Selain itu, media online menawarkan kecepatan dan kemudahan akses yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Informasi yang tersebar melalui media online dapat diakses secara real-time, sehingga pengguna selalu mendapatkan pembaruan terkini mengenai isu-isu yang sedang berkembang. Hal ini menjadi keunggulan utama media online, terutama di era di mana masyarakat membutuhkan akses cepat terhadap berita dan hiburan yang mereka butuhkan. Dengan hanya beberapa klik, informasi yang sebelumnya sulit dijangkau kini dapat diakses dengan mudah, bahkan oleh individu yang berada di wilayah terpencil sekalipun.

Keberadaan media online telah memberikan dampak signifikan dalam mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Kemampuan media online untuk menyediakan informasi secara cepat, mudah, dan tanpa batas geografis menjadikannya salah satu platform yang sangat dibutuhkan di era digital ini. Keunggulan-keunggulan tersebut menunjukkan bahwa

media online tidak hanya menjadi sarana komunikasi dan hiburan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung keterbukaan informasi di masyarakat global. (Winda Kustiawan et al., 2022)

2.4 Teori agenda setting

Teori Agenda Setting adalah teori dalam ilmu komunikasi yang menjelaskan bagaimana media massa memiliki pengaruh dalam menentukan isu-isu yang dianggap penting oleh publik. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Maxwell E. McCombs dan Donald L. Shaw dalam penelitian mereka pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1968, yang menunjukkan adanya hubungan antara isu-isu yang sering diberitakan media dan topik yang dianggap penting oleh masyarakat. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa media tidak hanya menginformasikan, tetapi juga mengendalikan agenda publik dengan memilih dan menyoroti isu-isu tertentu. Dengan kata lain, media tidak selalu mengubah pendapat masyarakat mengenai suatu isu, tetapi media membentuk persepsi masyarakat tentang isu apa yang harus diperhatikan. (Ritonga, 2018)

Dalam penerapannya, teori agenda setting menggambarkan bahwa media memiliki kemampuan untuk membentuk perhatian publik melalui seleksi, penekanan, dan pengulangan suatu isu dalam pemberitaan. Proses ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu agenda media, agenda publik, dan agenda kebijakan. Agenda media merujuk pada keputusan media dalam memilih dan menyoroti isu-isu tertentu yang akan dipublikasikan, sehingga memberikan gambaran kepada khalayak tentang apa yang

dianggap penting. Agenda publik muncul ketika isu-isu yang sering diberitakan oleh media mulai memengaruhi opini masyarakat dan menjadi topik yang dianggap relevan dalam kehidupan sosial. Sementara itu, agenda kebijakan terbentuk ketika perhatian publik terhadap suatu isu mendorong pembuat kebijakan untuk merespons dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan isu tersebut.

Teori agenda setting juga berkaitan erat dengan konsep gatekeeping, yaitu peran media dalam menyaring dan menentukan informasi yang akan disampaikan kepada publik. Dalam hal ini, media bertindak sebagai pengendali arus informasi dengan memilih berita yang dianggap memiliki nilai berita tinggi, sementara isu lain yang kurang dianggap penting dapat diabaikan atau mendapat sedikit perhatian. Selain itu, teori ini juga dikembangkan lebih lanjut menjadi agenda setting tingkat kedua (*second-level agenda setting*), yang tidak hanya berfokus pada isu yang harus diperhatikan publik, tetapi juga bagaimana isu tersebut dibingkai dan disajikan oleh media untuk memengaruhi persepsi khalayak.

Sebagai salah satu teori utama dalam komunikasi massa, teori agenda setting memiliki dampak signifikan dalam memahami hubungan antara media, masyarakat, dan kebijakan. Dalam berbagai penelitian, teori ini telah digunakan untuk menjelaskan bagaimana media dapat membentuk opini publik dalam isu-isu politik, sosial, dan ekonomi. Namun, teori ini juga mendapat kritik, terutama dalam era digital, di mana arus informasi tidak lagi sepenuhnya dikendalikan oleh media tradisional, melainkan juga

oleh media sosial dan interaksi antarindividu. Meskipun demikian, teori agenda setting tetap relevan dalam studi komunikasi modern karena menyoroti peran strategis media dalam membentuk lanskap informasi yang dikonsumsi oleh masyarakat.

2.5 Konstruksi realitas media

Konstruksi realitas media adalah proses di mana media massa membentuk dan membingkai suatu realitas sosial yang kemudian diterima oleh khalayak sebagai sebuah kebenaran. Teori ini berangkat dari konsep konstruksi sosial atas realitas yang dikembangkan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, yang menyatakan bahwa realitas sosial tidak bersifat objektif, melainkan hasil dari interaksi sosial dan representasi yang terus-menerus dibangun melalui komunikasi. Dalam konteks media, konstruksi realitas terjadi melalui pemilihan berita, cara penyajian informasi, serta penggunaan bahasa dan visual tertentu yang membentuk persepsi publik terhadap suatu peristiwa. (Rustanta et al., 2022)

Dalam kerangka ini, media berperan penting sebagai agen yang membentuk realitas sosial dengan cara memilih dan memberi makna pada peristiwa atau fenomena tertentu. Proses seleksi informasi dalam media seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepentingan politik, ekonomi, dan ideologi, yang dapat memengaruhi cara informasi disajikan kepada publik. Misalnya, cara media menyoroti atau mengabaikan suatu isu, framing atau pembedaan pesan yang digunakan, serta representasi visual dan narasi verbal yang dipilih, semuanya berkontribusi pada

bagaimana audiens memahami suatu kejadian atau fenomena sosial. Framing, sebagai salah satu konsep utama dalam konstruksi realitas media, mengacu pada cara media mengorganisir dan menyajikan informasi untuk memengaruhi penafsiran audiens terhadap suatu isu.

Selain itu, teori konstruksi realitas media juga menyoroti pengaruh media dalam menciptakan norma sosial dan identitas kolektif. Media, melalui representasi yang terus-menerus, memainkan peran dalam membentuk pandangan umum tentang apa yang dianggap "normal," "layak," atau "benar" dalam masyarakat. Misalnya, representasi gender, ras, dan kelas sosial dalam media tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga membentuk pemahaman dan sikap publik terhadap kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, konstruksi realitas media tidak hanya terbatas pada pembentukan persepsi terhadap peristiwa tertentu, tetapi juga memainkan peran dalam membentuk struktur sosial dan budaya yang lebih luas. Dengan demikian, media massa berfungsi sebagai agen yang sangat berpengaruh dalam membentuk dan mengatur cara kita memahami dan berinteraksi dengan dunia sosial di sekitar kita.

2.6 Presidential Threshold

Sistem *Presidential Threshold* atau ambang batas presiden merupakan sebuah mekanisme yang diterapkan dalam proses pemilihan umum untuk menentukan batas minimal perolehan suara partai politik dalam pemilihan legislatif sebagai syarat mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Secara umum, sistem ini bertujuan untuk

memberikan batasan atau *barrier to entry*, sehingga hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan tertentu yang dapat mencalonkan kandidat presiden. Dalam konteks ini, ambang batas tersebut diharapkan dapat menjadi alat seleksi untuk memastikan bahwa hanya kandidat dengan tingkat elektabilitas tinggi yang dapat berpartisipasi dalam pemilihan presiden. (Wilwatikta et al., 2025)

Salah satu alasan utama penerapan *Presidential Threshold* adalah untuk menyaring kandidat pemimpin yang berkualitas dan mencegah banyaknya calon yang kurang kompeten atau tidak relevan secara politik. Dengan membatasi jumlah calon presiden, sistem ini juga diharapkan mampu menciptakan stabilitas politik dan memastikan bahwa kandidat yang diajukan oleh partai memiliki dukungan politik yang kuat. Selain itu, keberadaan ambang batas ini diyakini dapat mendorong konsolidasi politik di antara partai-partai politik untuk membentuk koalisi yang lebih solid.

Sistem ini juga berupaya memastikan bahwa calon presiden dan wakil presiden yang maju memiliki elektabilitas yang cukup tinggi untuk memenangkan kontestasi politik di tingkat nasional. Partai politik diharapkan mengajukan kandidat yang tidak hanya memiliki reputasi baik, tetapi juga popularitas yang memadai untuk diterima oleh masyarakat luas.

Walaupun memiliki tujuan yang ideal, sistem *Presidential Threshold* tidak lepas dari kritik. Salah satu kelemahan utama dari sistem ini adalah potensinya untuk menjadi pembatas bagi calon non-partai yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden. Dalam banyak kasus, calon-calon

independen atau tokoh masyarakat yang mungkin memiliki kualitas kepemimpinan yang baik tetapi tidak memiliki dukungan politik formal dari partai sulit untuk bersaing dalam sistem ini. Hal ini menunjukkan bahwa sistem *Presidential Threshold* dapat menciptakan diskriminasi politik terhadap calon yang tidak berasal dari partai atau koalisi besar.

Sebaliknya, calon yang diusung oleh partai politik belum tentu memiliki kualitas kepemimpinan yang lebih baik dibandingkan dengan calon independen atau non-partai. Dalam beberapa situasi, partai politik cenderung memilih calon berdasarkan pertimbangan pragmatis atau elektoral, bukan berdasarkan kriteria kualitas atau kompetensi calon. Fenomena ini dapat mengakibatkan munculnya kandidat yang hanya populer tetapi tidak memiliki visi yang jelas untuk memimpin negara.

Lebih jauh lagi, sistem ini sering dikritik karena dianggap menciptakan hambatan struktural bagi demokrasi yang inklusif. Dalam demokrasi yang ideal, semua individu memiliki hak yang sama untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin, terlepas dari afiliasi politik mereka. Namun, *Presidential Threshold* dapat meminggirkan potensi kandidat yang berasal dari kelompok minoritas, individu independen, atau partai kecil yang tidak memiliki akses terhadap sumber daya politik yang besar.

Penerapan sistem *Presidential Threshold* juga memiliki dampak signifikan terhadap dinamika politik dan pemilu di Indonesia. Sistem ini sering kali mendorong partai-partai politik untuk membentuk koalisi besar demi memenuhi ambang batas yang ditentukan. Namun, koalisi yang

dibentuk semata-mata untuk memenuhi persyaratan administratif ini sering kali tidak dilandasi oleh visi atau platform politik yang sejalan. Akibatnya, koalisi tersebut cenderung rapuh dan rentan terhadap konflik internal. (Aziz et al., 2024)

Selain itu, sistem ini dapat mendorong peningkatan biaya politik, karena partai-partai kecil yang ingin ikut serta dalam pemilihan presiden sering kali harus menjalin kerja sama dengan partai besar, yang sering kali membutuhkan negosiasi politik yang mahal. Fenomena ini dapat memperkuat praktik oligarki politik, di mana kelompok-kelompok tertentu dengan sumber daya besar memiliki pengaruh yang tidak proporsional dalam menentukan kandidat presiden.

2.7 Analisis isi Model Krippendorff

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan analisis isi yang dikembangkan oleh Klaus Krippendorff, yang mengelompokkan analisis isi ke dalam tiga kategori utama. Pertama, analisis pragmatik, yang menekankan pada hubungan sebab-akibat dari penggunaan tanda atau simbol dalam komunikasi. Kedua, analisis semantik, yang berfokus pada makna yang terkandung dalam tanda atau simbol tersebut. Ketiga, analisis sintaktik, yang mengkaji struktur dan bentuk fisik dari tanda, termasuk aspek psiko-fisik yang menyertainya. Klasifikasi ini membantu peneliti dalam memahami berbagai dimensi makna dan fungsi dari elemen-elemen komunikasi yang dianalisis. (Effendi, 2024)

Analisis isi merupakan metode yang banyak digunakan dalam penelitian komunikasi untuk memahami bagaimana suatu teks atau pesan dikonstruksi dan dipahami. Salah satu pendekatan yang sering digunakan dalam analisis isi adalah Model Krippendorff, yang dikembangkan oleh Klaus Krippendorff. Model ini pada awalnya lebih sering diterapkan dalam penelitian kuantitatif, terutama dalam mengukur reliabilitas pengkodean melalui Krippendorff's Alpha, yang digunakan untuk menentukan kesepakatan antar pengkode dalam suatu penelitian. Namun, dalam pendekatan kualitatif, metode ini tidak hanya berfokus pada pengukuran statistik atau frekuensi kemunculan kata dan frasa dalam teks, melainkan juga pada pemahaman mendalam terhadap makna, tema, dan konteks sosial dari teks yang dianalisis.

Dalam analisis isi model Krippendorff dengan pendekatan kualitatif, peneliti lebih menitik beratkan pada interpretasi kontekstual dan analisis tematik. Proses analisis ini melibatkan pengkodean teks dengan mengidentifikasi tema atau pola yang muncul, seperti sikap, nilai, atau perspektif yang terkandung dalam suatu berita atau teks lainnya. Pengkodean dilakukan secara sistematis dengan menentukan kategori tertentu berdasarkan teori dan tujuan penelitian. Meskipun Krippendorff's Alpha sering digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk mengukur reliabilitas antar pengkode, dalam pendekatan kualitatif, nilai Alpha lebih berperan sebagai alat untuk memastikan bahwa para pengkode memiliki pemahaman yang seragam terhadap kategori yang ditetapkan. Hal ini

penting agar interpretasi tetap konsisten meskipun analisis bersifat subjektif.

Setelah tahap pengkodean, analisis tematik dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara berbagai tema yang muncul dalam teks. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya melihat pola yang sering muncul, tetapi juga bagaimana konteks sosial, politik, atau budaya mempengaruhi cara suatu pesan disampaikan dan diterima oleh audiens. Oleh karena itu, analisis isi model Krippendorff dalam pendekatan kualitatif berusaha untuk mengungkap makna yang lebih dalam dari suatu teks, bukan sekadar menghitung jumlah kemunculan kata atau frasa tertentu.

Keunggulan dari pendekatan ini adalah kemampuannya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan reflektif terhadap isi komunikasi. Dalam penelitian media, misalnya, pendekatan ini dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana berita membingkai suatu isu, bagaimana perspektif tertentu lebih dominan dibandingkan perspektif lainnya, serta bagaimana bahasa dan narasi yang digunakan dapat membentuk opini publik. Dengan demikian, meskipun analisis isi model Krippendorff memiliki akar dalam penelitian kuantitatif, pendekatan kualitatifnya memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami teks secara lebih mendalam dan kontekstual.

Selain itu, metode ini juga memungkinkan peneliti untuk mengaitkan teks dengan struktur kekuasaan dan ideologi yang lebih luas. Dalam studi media, analisis ini dapat membantu mengungkap bagaimana

media membentuk wacana sosial dan politik tertentu, bagaimana representasi suatu kelompok atau peristiwa dikonstruksi, serta bagaimana aspek-aspek tersembunyi dalam teks dapat mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap suatu isu. Dengan menelaah tidak hanya isi eksplisit dari teks tetapi juga makna implisitnya, pendekatan ini membantu peneliti dalam menggali struktur makna yang lebih kompleks dalam komunikasi massa.

Secara keseluruhan, analisis isi model Krippendorff dengan pendekatan kualitatif memberikan kerangka kerja yang sistematis namun fleksibel dalam memahami teks. Dengan menggabungkan teknik pengkodean yang terstruktur dengan analisis yang lebih interpretatif, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji bagaimana pesan dikonstruksi, bagaimana ideologi dan nilai tertentu diperkuat, serta bagaimana audiens dapat menginterpretasikan teks dalam berbagai konteks sosial. Oleh karena itu, pendekatan ini sangat relevan dalam penelitian komunikasi, media, dan ilmu sosial lainnya, terutama dalam memahami dinamika wacana dan representasi dalam berbagai bentuk teks..

2.8 Anggapan Dasar

berita merupakan sebuah bentuk komunikasi yang memiliki tujuan untuk menginformasikan masyarakat mengenai peristiwa atau kejadian yang dianggap penting dan relevan. Sebagai produk komunikasi massa, berita diharapkan dapat disampaikan secara objektif, akurat, dan sesuai dengan fakta yang ada, sehingga masyarakat dapat memperoleh

pengetahuan yang benar tentang peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Dengan demikian, berita bukan hanya sekadar penyampaian informasi, tetapi juga alat untuk membentuk opini publik, mendidik masyarakat, serta menjaga fungsi kontrol sosial dalam masyarakat.

Selain itu, anggapan dasar lainnya adalah bahwa proses penyampaian berita harus memperhatikan kaidah jurnalistik yang berfokus pada prinsip objektivitas, keakuratan, dan kejelasan. Informasi yang disajikan dalam berita harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan sesuai dengan konteks yang relevan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, atau budaya masyarakat. Oleh karena itu, berita tidak hanya sekadar informasi yang mengandung fakta, tetapi juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku masyarakat, serta dapat mempengaruhi pandangan publik terhadap isu-isu tertentu.

Dengan anggapan dasar tersebut, pemahaman tentang berita tidak hanya terbatas pada sekadar media yang menyampaikan informasi, tetapi juga pada peranannya dalam membentuk kesadaran sosial, membangun budaya informasi yang sehat, dan menjaga keseimbangan dalam penyebaran informasi di era digital yang semakin berkembang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kualitatif berdasarkan pendekatan Krippendorff, tidak menggunakan analisis isi kuantitatif seperti perhitungan jumlah kata atau frekuensi kemunculan tema. Menurut Sugiyono (2011:56), penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mempelajari objek dalam kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Berbeda dengan penelitian kuantitatif, penelitian ini dimulai dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai alat untuk menjelaskan, dan menghasilkan sebuah teori sebagai outputnya. Sementara itu, Bungin (2003:147) menyatakan bahwa metode analisis ini bersifat integratif dan lebih konseptual, bertujuan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, serta menganalisis dokumen demi memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.

Penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif dengan pendekatan analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam tentang suatu kasus atau fenomena tertentu melalui pengumpulan data yang komprehensif dan mendetail. Menurut Gunawan (2015:82), penelitian kualitatif dirancang untuk mengeksplorasi suatu masalah secara menyeluruh, dengan fokus pada makna, proses, dan konteks yang melatarbelakangi fenomena yang sedang

dikaji. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memahami kompleksitas isu secara lebih holistik, termasuk aspek-aspek yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. (Astuti et al., 2021)

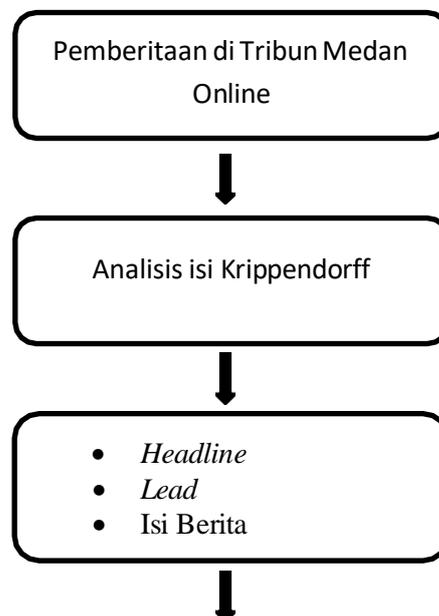
Penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala yang terjadi secara alami. Penelitian ini bersifat mendasar, naturalistik, dan dilakukan di lingkungan aslinya, bukan di laboratorium, sehingga sering disebut sebagai *naturalistic inquiry* atau *field study*. Menurut Bogdan dan Taylor (1982), penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu maupun perilaku yang diamati. Pendekatan ini dirancang untuk memahami latar dan individu secara menyeluruh (*holistic*). Kirk dan Miller menambahkan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu sosial yang sangat bergantung pada pengamatan manusia di lingkungan aslinya serta berinteraksi dengan mereka menggunakan bahasa dan istilah yang mereka gunakan. (Ummah, 2019)

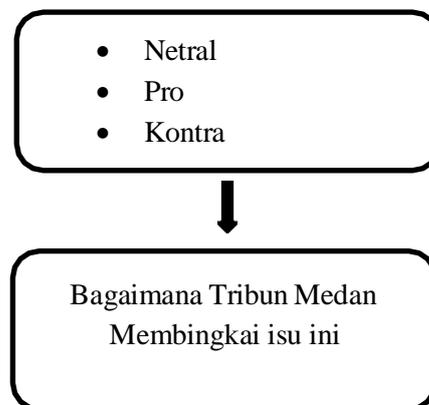
Rancangan penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan berupa Studi Kepustakaan *Library Research*. Studi kepustakaan adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data dengan memanfaatkan berbagai sumber material yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut dapat berupa dokumen, buku, majalah, artikel ilmiah, kisah-kisah sejarah, dan berbagai literatur lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini memungkinkan peneliti untuk

mengakses dan mempelajari beragam referensi yang memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang dikaji.

Selain itu, studi kepustakaan juga melibatkan analisis terhadap berbagai buku rujukan dan hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema atau relevansi dengan penelitian yang sedang dilakukan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang kuat dan mendukung pemahaman lebih mendalam tentang masalah yang menjadi fokus penelitian. Dengan menggabungkan berbagai sumber informasi, studi kepustakaan tidak hanya membantu peneliti dalam memahami konteks dan latar belakang masalah, tetapi juga memberikan dasar konseptual yang kokoh untuk membangun argumen dan menjawab pertanyaan penelitian secara ilmiah. Pendekatan ini menjadi langkah awal yang esensial dalam penelitian karena menyediakan pijakan teoretis yang akan digunakan dalam proses analisis dan interpretasi data lebih lanjut. (Aris Dwi Cahyono, 2021)

3.2 Kerangka konsep





3.3 Definisi konsep

Penelitian ini menganalisis pemberitaan Tribun Medan Online tentang penghapusan *Presidential Threshold* 20% menggunakan analisis isi kualitatif (Krippendorff, 2004). Fokus penelitian mencakup struktur berita (judul, isi, dan gaya bahasa) serta kecenderungan media, apakah netral, pro, atau kontra terhadap isu ini.

3.4 Kategorisasi penelitian

Konsep Teoritis	Kategorisasi
Analisis isi model Krippendorff pada penghapusan <i>Presidential Threshold</i> 20%	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur Berita <ul style="list-style-type: none"> a) Judul b) Lead berita c) Isi berita • Pola Pemberitaan <ul style="list-style-type: none"> a) Tema utama yang sering muncul b) Fokus berita c) Gaya penulisan berita • Kecenderungan Media <ul style="list-style-type: none"> a) Netral b) Pro c) kontra

Tabel 3.1 Kategorisasi penelitian

3.5 Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang memiliki berbagai definisi dari para ahli. Menurut Mardalis (1999), penelitian kepustakaan adalah studi yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dan data melalui berbagai material yang tersedia di perpustakaan, seperti dokumen, buku, majalah, dan kisah sejarah. Sarwono (2006) menambahkan bahwa penelitian ini mencakup pengkajian buku referensi dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan untuk memperoleh landasan teori terkait masalah yang diteliti. Selanjutnya, Nazir (1988) menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, dan laporan yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Sementara itu, Sugiyono (2012) mendefinisikannya sebagai kajian teoretis, referensi, dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan budaya, nilai, serta norma dalam situasi sosial yang sedang diteliti.

Penelitian kepustakaan merupakan sebuah kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai jenis sumber material yang tersedia di perpustakaan. Sumber-sumber tersebut meliputi buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, artikel, catatan, jurnal ilmiah, dan dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Proses ini melibatkan pengumpulan informasi secara terstruktur untuk memperoleh data yang relevan dan mendukung analisis terhadap isu yang dikaji.

Dalam penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan secara sistematis dengan menggunakan metode atau teknik tertentu yang dirancang untuk memproses, menganalisis, dan menyimpulkan informasi secara akurat. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mendapatkan landasan teori yang solid serta jawaban yang memadai atas permasalahan penelitian yang sedang dihadapi. Dengan pendekatan yang terencana, penelitian kepustakaan tidak hanya membantu menjelaskan konteks dari permasalahan yang diteliti, tetapi juga memberikan wawasan mendalam melalui integrasi berbagai sumber literatur yang relevan. (Sari, 2020)

3.6 Teknik analisis data

Penelitian ini berfokus pada analisis berita yang membahas penghapusan *Presidential Threshold* 20% di media Tribun Medan Online dengan menggunakan metode analisis isi. Penghapusan *Presidential Threshold* 20% menjadi isu penting dalam ranah politik Indonesia, terutama terkait dengan wacana peningkatan demokrasi dan keterbukaan dalam proses pemilihan presiden. Metode analisis isi memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana isu ini diangkat, dibingkai, dan disampaikan kepada publik melalui media.

Menurut Max Weber (dalam Eriyanto, 2011:15), analisis isi adalah metode penelitian yang menggunakan seperangkat prosedur sistematis untuk menarik inferensi yang valid dari teks. Dalam konteks ini, analisis isi tidak hanya berfungsi untuk mengkaji pesan-pesan eksplisit yang tersampaikan dalam berita, tetapi juga untuk mengungkap makna-makna

tersembunyi atau implisit yang mungkin terkandung di dalamnya. Metode ini dilakukan dengan cara meneliti dan menganalisis isi komunikasi dalam ruang lingkup tertentu, baik dari segi waktu, konteks, maupun sudut pandang. (Yuningsih et al., 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola pemberitaan yang terkait dengan penghapusan *Presidential Threshold* 20% di media Tribun Medan Online, seperti bagaimana media menyusun narasi, memilih sumber berita, dan menyajikan argumen terkait isu ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang kecenderungan pesan yang disampaikan media, tetapi juga mengungkap bagaimana isu politik ini dipersepsikan oleh publik melalui pemberitaan.

Analisis isi digunakan untuk mendapatkan informasi dari pesan komunikasi yang disampaikan melalui berbagai bentuk simbol. Menurut Jalaluddin dalam bukunya *Metode Penelitian Komunikasi* (2004:89), metode ini dapat diterapkan untuk menganalisis berbagai jenis komunikasi, seperti surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato, surat, peraturan, undang-undang, musik, teater, dan lain-lain. Proses analisis isi bertujuan untuk mengidentifikasi dan menentukan konsep-konsep yang dibahas dalam isi berita, yang kemudian disajikan kepada pengguna informasi dalam bentuk kata kunci atau *descriptor*. *Descriptor* ini berfungsi sebagai istilah pencarian (*searching terms*) yang digunakan pengguna untuk mengakses data di dalam pangkalan informasi.

3.7 Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang bertujuan untuk menganalisis pemberitaan di media online Tribun Medan terkait permasalahan penghapusan 20%. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi untuk menggali lebih dalam mengenai pola pemberitaan, fokus utama, serta kecenderungan penyampaian pesan yang disajikan oleh media. Judul penelitian ini adalah "Analisis Isi Berita Tentang Penghapusan 20% di Media Tribun Medan Online."

Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami bagaimana isu penghapusan 20% diberitakan, termasuk narasi yang dibangun, aktor-aktor yang diangkat, serta makna yang terkandung dalam pemberitaan tersebut. Studi ini akan dimulai pada Februari 2025 dan direncanakan berlangsung hingga seluruh tahapan penelitian selesai dilakukan, mencakup pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Hasil penelitian

4.1.1 Profil Tribun Medan

Tribun Medan merupakan salah satu media massa terbesar yang berkantor pusat di Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Tribun Medan merupakan bagian dari jaringan media Tribun milik Kompas Gramedia, salah satu kelompok media terbesar di Indonesia. Media ini memiliki platform online yang cukup populer dan terbuka luas bagi para pembaca, khususnya di wilayah Sumatera Utara, yang dikenal dengan tribunmedan.id sebagai situs resminya.

Sebagai media berita, Tribun Medan menyajikan berita terkini tentang berbagai topik, seperti isu legislatif, ekonomi, sosial, budaya, hiburan, olahraga, dan lain-lain. Media ini berfokus pada penyediaan informasi yang cepat dan akurat, sehingga menjadi sumber berita yang terpercaya bagi para pembaca baik di tingkat lokal maupun nasional.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, Tribun Medan juga menyediakan berbagai platform digital seperti aplikasi seluler dan media sosial, seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, untuk menyebarkan berita kepada khalayak yang lebih luas. Media ini memiliki pembaca yang sangat beragam, mulai dari kalangan muda hingga dewasa, baik di kota-kota besar maupun di wilayah Medan.

Berita yang disajikan oleh Tribun Medan secara berkala menggambarkan situasi sosial, politik, dan ekonomi di daerah tersebut, serta meliput isu-isu yang lebih luas yang relevan dengan perkembangan nasional. Selain perkembangan media, Tribun Medan juga secara berkala menyajikan berbagai konten yang intuitif seperti video, infografis, dan survei opini, yang semakin menarik perhatian pembaca di dunia maya.

Selain itu, Tribun Medan dikenal dengan pendekatan jurnalistiknya yang responsif terhadap isu-isu lokal dan isu-isu penting bagi masyarakat Sumatera Utara, sehingga menjadikannya salah satu media yang paling banyak diakses oleh masyarakat lokal. Dalam konteks berita politik, Tribun Medan juga menyediakan berbagai informasi terkait perkembangan politik di tingkat daerah (Sumatera Utara) dan nasional. Berita tentang peristiwa politik, kebijakan pemerintah, dan opini publik sering menjadi topik utama dalam beberapa edisi.

Perenungan ini akan meneliti substansi berita yang disebarkan oleh Tribun Medan sehubungan dengan isu-isu tertentu, dengan fokus pada bagaimana outlet media ini membingkai isu-isu tersebut dan pengaruhnya terhadap pengakuan publik di wilayah Sumatera Utara, dengan memanfaatkan metode analisis substansi Krippendorff untuk menilai konsistensi pengkodean dan penerjemahan subjek-subjek relevan dalam berita-berita yang dianalisis.

4.1.2 Deskripsi Berita *Presidential Threshold* 20% di Tribun Medan

Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2025 hingga Maret 2025, dengan fokus utama pada berita tentang pencabutan Batas Maksimum Pemilihan Presiden 20% yang dimuat Tribun Medan Online. Untuk memahami secara mendalam bagaimana topik ini direpresentasikan oleh media, peneliti meninjau beberapa artikel yang terbit pada bulan Januari 2025.

Pemilihan artikel berita pada bulan Januari 2025 dilakukan dengan pemahaman bahwa pada rentang waktu tersebut terdapat wacana penting tentang pencabutan Batas Maksimum Pemilihan Presiden 20%, yang menarik minat besar dalam diskusi politik dan media. Topik tersebut menjadi katalis berbagai perdebatan di kalangan politisi, akademisi, dan masyarakat, yang selanjutnya dipengaruhi oleh pemberitaan media. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana Tribun Medan Online menyajikan isu ini dalam liputan beritanya, dengan mengkaji aspek-aspek seperti organisasi berita, tren pelaporan, pilihan bahasa, dan bias media dalam menggambarkan narasi tertentu.

Berita yang dievaluasi dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria tertentu, termasuk relevansinya dengan fokus penelitian, hubungannya dengan lanskap politik nasional, dan pentingnya berita tersebut terkait dengan pertimbangan hukum dan demokrasi yang terkait dengan perdebatan *Presidential Threshold*. Berikut keterangan berita yang dipilih untuk diteliti :

Tabel 4.1 : Keterangan berita

No	Tanggal	Judul	Link
1	Kamis, 2 Januari 2025	ALASAN MK Hapus <i>Presidential Threshold</i> : Ambang Batas Pencalonan Langgar Moralitas dan tak Adil	https://medan.tribunnews.com/2025/01/02/alasan-mk-hapus-presidential-threshold-ambang-batas-pencalonan-langgar-moralitas-dan-tak-adil
2	Kamis, 2 Januari 2025	MK Hapus <i>Presidential Threshold</i> , Dinilai tak Adil, Semua Parpol Berhak Usung Paslon di Pilpres	https://medan.tribunnews.com/2025/01/02/mk-hapus-presidential-threshold-dinilai-tak-adil-semua-parpol-berhak-usung-paslon-di-pilpres
3	Jumat, 3 Januari 2025	Menko Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan <i>Presidential Threshold</i> Artikel ini telah tayang di Tribun-Medan.com dengan judul Menko Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan <i>Presidential Threshold</i>	https://medan.tribunnews.com/2025/01/03/menko-yusril-pemerintah-hormati-putusan-mk-yang-batalkan-presidential-threshold
4	Jumat, 3 Januari 2025	MK Hapus <i>Presidential Threshold</i> 20 Persen, PDIP: Kami Sepenuhnya Tunduk dan Patuh	https://medan.tribunnews.com/2025/01/03/mk-hapus-presidential-threshold-20-persen-pdip-kami-sepenuhnya-tunduk-dan-patuh
5	Sabtu, 4 Januari 2025	Akademisi UMSU Tanggapi soal MK Hapus <i>Presidential Threshold</i>	https://medan.tribunnews.com/2025/01/04/akademisi-umsu-tanggapi-soal-mk-hapus-presidential-treshold

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis struktur Berita

Struktur berita dianalisis berdasarkan judul, isi, dan sumber berita yang digunakan dalam pemberitaan Tribun Medan Online.

a) Alasan MK Hapus *Presidential Threshold*: Ambang Batas Pencalonan Langgar Moralitas dan Tak Adil

1. Judul Berita:

Judul ini secara eksplisit menyampaikan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam membatalkan aturan *Presidential Threshold* dengan menekankan dua alasan utama, yakni pelanggaran moralitas dan ketidakadilan. Pemilihan diksi seperti "langgar moralitas" dan "tak adil" menunjukkan bahwa pemberitaan ini menyoroti aspek normatif dan etis dalam putusan tersebut.

2. Isi Berita:

Berita ini menguraikan bahwa MK memutuskan penghapusan *Presidential Threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Keputusan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa aturan ambang batas bertentangan dengan hak politik dan kedaulatan rakyat, serta melanggar prinsip keadilan dan moralitas dalam sistem pemilu.

Selain itu, Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa ketentuan *Presidential Threshold* berpotensi membatasi jumlah pasangan calon dalam pemilu, sehingga tidak selaras dengan prinsip demokrasi yang berkeadilan. Dalam berita ini juga disebutkan bahwa penghapusan aturan ini diharapkan dapat mendorong partisipasi politik yang lebih inklusif.

3. Sumber Berita:

Sumber utama dalam pemberitaan ini berasal dari pernyataan resmi Hakim Konstitusi Saldi Isra dan Ketua MK Suhartoyo, yang disampaikan dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta.

b) MK Hapus *Presidential Threshold* Dinilai Tak Adil, Semua Parpol Berhak Usung Paslon di Pilpres

1. Judul Berita:

Judul berita ini menekankan perspektif yang menilai bahwa penghapusan *Presidential Threshold* dapat berdampak negatif, dengan menyoroti permasalahan keadilan dan keterbukaan pencalonan dalam Pemilu Presiden (Pilpres). Pemilihan diksi "dinilai tak adil" dan "semua parpol berhak usung paslon" menunjukkan bahwa berita ini mencoba menyoroti dampak sistemik dari keputusan MK.

2. Isi Berita:

Isi berita membahas pandangan bahwa penghapusan *Presidential Threshold* dapat dianggap tidak adil, karena memungkinkan

semua partai politik (parpol) untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, tanpa memandang perolehan suara atau kursi di parlemen. Dalam analisisnya, berita ini menyoroti bahwa keputusan ini berpotensi memunculkan terlalu banyak calon, yang dapat menyebabkan pemecahan suara dan meningkatkan kompleksitas pemilihan umum.

3. Sumber Berita:

Sumber informasi dalam berita ini berasal dari pakar politik dan perwakilan partai politik, yang menyoroti implikasi negatif dari penghapusan *Presidential Threshold* terhadap stabilitas politik di Indonesia.

c) Menko Jusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan *Presidential Threshold*

1. Judul Berita:

Judul berita ini merepresentasikan sikap resmi pemerintah, khususnya yang diwakili oleh Menteri Koordinator Hukum dan HAM, Jusril Ihza Mahendra, terhadap putusan MK terkait pembatalan *Presidential Threshold*. Pemilihan kata "hormati putusan MK" menekankan aspek kepatuhan pemerintah terhadap ketetapan hukum yang bersifat final dan mengikat.

2. Isi Berita:

Berita ini menjelaskan bahwa pemerintah menerima dan menghormati keputusan MK yang membatalkan aturan

Presidential Threshold. Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga pemerintah akan menyesuaikan kebijakan terkait pemilu berdasarkan ketentuan baru ini. Selain itu, Yusril menekankan bahwa pemerintah akan mengkaji dampak hukum dan politik dari perubahan sistem ini guna memastikan kelangsungan demokrasi yang stabil.

3. Sumber Berita:

Berita ini mengacu pada pernyataan resmi dari Menko Yusril Ihza Mahendra, yang disampaikan melalui keterangan tertulis kepada media pada tanggal 3 Januari 2025.

d) MK Hapus *Presidential Threshold* 20 Persen, PDIP: Kami Sepenuhnya Tunduk dan Patuh

1. Judul Berita:

Judul berita ini menyoroti respons dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap keputusan MK. Pemilihan diksi "sepenuhnya tunduk dan patuh" menunjukkan bahwa PDIP secara eksplisit menyatakan kepatuhan terhadap putusan MK, yang menandakan sikap legitimasi hukum dan komitmen politik partai terhadap sistem demokrasi konstitusional.

2. Isi Berita:

Isi berita menjelaskan bahwa PDIP menerima dan menghormati putusan MK mengenai penghapusan *Presidential Threshold*.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah menegaskan bahwa putusan ini bersifat final, sehingga harus dijadikan acuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang akan dibahas di DPR. Selain itu, PDIP juga menyoroti pentingnya pengaturan mekanisme kerja sama antarpantai, agar presiden dan wakil presiden terpilih tetap mendapatkan dukungan politik yang kuat di parlemen.

3. Sumber Berita:

Sumber utama dalam berita ini adalah pernyataan resmi Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, yang disampaikan dalam keterangan tertulis kepada media pada 3 Januari 2025.

e) Akademisi UMSU Tanggapi Soal MK Hapus *Presidential Threshold*

1. Judul Berita:

Judul berita ini menampilkan perspektif akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) terkait putusan MK mengenai penghapusan *Presidential Threshold*. Pemilihan diksi "Akademisi UMSU tanggapi" menunjukkan bahwa berita ini mengedepankan analisis ilmiah terhadap implikasi keputusan tersebut.

2. Isi Berita:

Berita ini membahas pandangan akademisi UMSU yang menilai bahwa putusan MK akan membawa perubahan signifikan dalam sistem politik Indonesia. Dalam analisisnya, akademisi tersebut

menggarisbawahi bahwa penghapusan *Presidential Threshold* dapat memperluas partisipasi politik, tetapi juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang lebih besar. Selain itu, akademisi menyoroti bahwa keputusan ini harus diikuti dengan penguatan sistem kepartaian, agar mekanisme pencalonan tetap berjalan secara demokratis dan terkendali.

3. Sumber Berita:

Berita ini mengacu pada pendapat akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang disampaikan dalam diskusi akademik dan wawancara dengan media pada 4 Januari 2025.

4.2.2 Analisis pola pemberitaan

Pola pemberitaan dianalisis untuk melihat tema yang paling dominan dalam berita dan fokus utama pemberitaan terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.

a) Alasan MK Hapus *Presidential Threshold*: Ambang Batas Pencalonan Langgar Moralitas dan Tak Adil

1. Tema Dominan: Keputusan MK menghapus *Presidential Threshold* karena dianggap melanggar moralitas dan ketidakadilan dalam proses pencalonan presiden.
2. Fokus Utama Pemberitaan: Penjelasan mengenai alasan MK memutuskan bahwa ambang batas pencalonan presiden bertentangan dengan nilai-nilai moral dan

prinsip keadilan, serta implikasi dari keputusan tersebut terhadap sistem politik Indonesia.

b) MK Hapus *Presidential Threshold* Dinilai Tak Adil, Semua Parpol Berhak Usung Paslon di Pilpres

1. Tema Dominan: Penghapusan *Presidential Threshold* membuka kesempatan bagi semua partai politik untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.
2. Fokus Utama Pemberitaan: Penekanan pada pandangan bahwa ambang batas pencalonan presiden sebelumnya dianggap tidak adil, dan dengan dihapuskannya aturan tersebut, semua partai politik memiliki hak yang sama untuk mencalonkan pasangan calon dalam pemilihan presiden.

c) Menko Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan *Presidential Threshold*

1. Tema Dominan: Sikap pemerintah yang menghormati dan menerima putusan MK terkait penghapusan *Presidential Threshold*.
2. Fokus Utama Pemberitaan: Pernyataan Menteri Koordinator Yusril yang menegaskan bahwa pemerintah menghormati keputusan MK, serta implikasi dari sikap tersebut terhadap pelaksanaan pemilihan presiden mendatang.

d) MK Hapus *Presidential Threshold* 20 Persen, PDIP: Kami Sepenuhnya Tunduk dan Patuh

1. Tema Dominan: Respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap putusan MK yang menghapus *Presidential Threshold*.
2. Fokus Utama Pemberitaan: Pernyataan resmi PDIP yang menyatakan kepatuhan penuh terhadap putusan MK, serta bagaimana partai tersebut akan menyesuaikan strategi politiknya dalam konteks aturan baru tanpa ambang batas pencalonan presiden.

e) Akademisi UMSU Tanggapi Soal MK Hapus *Presidential Threshold*

1. Tema Dominan: Pandangan akademisi dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) mengenai penghapusan *Presidential Threshold* oleh MK.
2. Fokus Utama Pemberitaan: Analisis dan tanggapan akademisi UMSU terkait dampak penghapusan ambang batas pencalonan presiden terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia, serta perspektif akademis mengenai perubahan tersebut.

Interpretasi :

- Keputusan MK menjadi tema utama dalam pemberitaan. Hal ini menegaskan bahwa Tribun Medan Online meringkaskan isu ini

sebagai keputusan hukum yang memiliki dampak besar terhadap demokrasi dan keadilan dalam pemilu.

- Pemberitaan juga menyoroti dampak penghapusan *Presidential Threshold*, terutama terkait dengan stabilitas sistem politik dan kepartaian.
- Respon dari berbagai aktor politik, seperti pemerintah dan partai politik, juga mendapatkan sorotan utama, menunjukkan bagaimana aktor-aktor ini menerima dan menyesuaikan diri dengan keputusan MK.

4.2.3 Analisis gaya bahasa

Gaya bahasa dianalisis berdasarkan pemilihan diksi, nada pemberitaan, dan penggunaan istilah tertentu yang muncul dalam kelima berita yang dianalisis.

a) Alasan MK Hapus *Presidential Threshold*: Ambang Batas Pencalonan Langgar Moralitas dan Tak Adil

1. Pemilihan Diksi: Berita ini menggunakan kata-kata seperti "langgar moralitas" dan "tak adil" yang memiliki konotasi negatif, menekankan ketidakadilan dan pelanggaran nilai moral dalam penerapan *Presidential Threshold*.
2. Nada Pemberitaan: Nada yang digunakan cenderung kritis terhadap *Presidential Threshold*, menyoroti aspek-

aspek negatif yang mendasari keputusan MK untuk menghapusnya.

3. Penggunaan Istilah: Istilah-istilah hukum seperti "ambang batas pencalonan" dan "*Presidential Threshold*" digunakan untuk menjelaskan konteks permasalahan secara spesifik.

b) MK Hapus *Presidential Threshold* Dinilai Tak Adil, Semua Parpol Berhak Usung Paslon di Pilpres

1. Pemilihan Diksi: Penggunaan kata "tak adil" menekankan ketidakadilan yang dirasakan akibat penerapan *Presidential Threshold*, sementara frasa "semua parpol berhak usung paslon" menekankan inklusivitas dan kesetaraan.

2. Nada Pemberitaan: Nada yang digunakan optimis dan positif, menyoroti kesempatan baru bagi semua partai politik untuk mengusung pasangan calon tanpa hambatan ambang batas.

3. Penggunaan Istilah: Istilah "parpol" dan "paslon" yang merupakan singkatan dari "partai politik" dan "pasangan calon" digunakan untuk mempermudah pemahaman pembaca.

c) Menko Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan *Presidential Threshold*

1. Pemilihan Diksi: Kata "hormati" menunjukkan sikap pemerintah yang menerima dan menghargai keputusan MK, menekankan kepatuhan terhadap hukum.
 2. Nada Pemberitaan: Nada yang digunakan formal dan netral, mencerminkan sikap resmi pemerintah dalam menanggapi putusan MK.
 3. Penggunaan Istilah: Istilah "Menko" sebagai singkatan dari "Menteri Koordinator" dan "putusan MK" digunakan untuk merujuk pada keputusan Mahkamah Konstitusi.
- d) MK Hapus *Presidential Threshold* 20 Persen, PDIP: Kami Sepenuhnya Tunduk dan Patuh
1. Pemilihan Diksi: Frasa "sepenuhnya tunduk dan patuh" menunjukkan sikap kepatuhan total PDIP terhadap putusan MK, menekankan loyalitas dan ketaatan pada hukum.
 2. Nada Pemberitaan: Nada yang digunakan formal dan menunjukkan sikap hormat, mencerminkan respons resmi partai terhadap keputusan yudisial.
 3. Penggunaan Istilah: Istilah "PDIP" sebagai akronim dari "Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan" digunakan untuk merujuk pada partai tersebut.

e) Akademisi UMSU Tanggapi Soal MK Hapus *Presidential Threshold*

1. Pemilihan Diksi: Kata "tanggapi" menunjukkan respons atau pandangan dari kalangan akademisi, menekankan analisis dan pemikiran kritis.
2. Nada Pemberitaan: Nada yang digunakan analitis dan objektif, mencerminkan pendekatan akademis dalam menilai dampak putusan MK.
3. Penggunaan Istilah: Istilah "akademisi" dan "UMSU" (Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) digunakan untuk menunjukkan sumber pendapat yang kredibel dan berpendidikan.

Kesimpulan analisis gaya bahasa :

masing-masing berita membingkai informasi sesuai dengan perspektif dan tujuan komunikasinya. Beberapa berita menekankan ketidakadilan dan pelanggaran moralitas dari *Presidential Threshold*, sementara yang lain menyoroti respons positif dari pemerintah dan partai politik terhadap putusan MK. Pendekatan analitis dari akademisi juga ditampilkan untuk memberikan pandangan yang lebih objektif.

4.2.4 Analisis framing media

Dalam menganalisis framing media yang digunakan oleh Tribun Medan Online dalam pemberitaan mengenai penghapusan *Presidential Threshold* 20%, Framing dianalisis berdasarkan pemilihan fakta, sudut

pandang yang ditampilkan, dan faktor yang lebih ditonjolkan dalam pemberitaan.

a) Alasan MK Hapus *Presidential Threshold*: Ambang Batas

Pencalonan Langgar Moralitas dan Tak Adil.

1. Fakta yang Ditekankan: Berita ini menyoroti alasan-alasan MK dalam menghapus *Presidential Threshold*, terutama karena dianggap melanggar moralitas dan ketidakadilan dalam proses pencalonan presiden. Disebutkan bahwa ambang batas tersebut membatasi hak partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sehingga tidak semua partai memiliki kesempatan yang sama.
2. Sudut Pandang yang Ditampilkan: Berita ini menampilkan sudut pandang MK yang menilai bahwa *Presidential Threshold* bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas dalam demokrasi. Tidak ada sudut pandang lain yang disajikan, sehingga pembaca diarahkan untuk memahami alasan penghapusan tersebut dari perspektif MK.
3. Faktor yang Ditonjolkan: Penekanan pada aspek moralitas dan keadilan sebagai alasan utama penghapusan *Presidential Threshold*. Berita ini

menonjolkan bahwa aturan tersebut dianggap tidak adil dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi.

b) MK Hapus *Presidential Threshold* Dinilai Tak Adil, Semua Parpol Berhak Usung Paslon di Pilpres

1. Fakta yang Ditekankan: Berita ini menekankan bahwa dengan dihapuskannya *Presidential Threshold*, semua partai politik kini memiliki hak untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan presiden. Hal ini dianggap sebagai langkah menuju keadilan dalam proses pemilu.
2. Sudut Pandang yang Ditampilkan: Sudut pandang yang ditampilkan adalah pandangan positif terhadap penghapusan *Presidential Threshold*, dengan menekankan bahwa semua partai politik, tanpa terkecuali, berhak mengusung calon mereka sendiri.
3. Faktor yang Ditonjolkan: Penekanan pada keadilan dan kesetaraan bagi semua partai politik dalam proses pencalonan presiden, serta penghapusan hambatan yang sebelumnya membatasi partai-partai kecil atau baru.

c) Menko Yusril: Pemerintah Hormati Putusan MK yang Batalkan *Presidential Threshold*

1. Fakta yang Ditekankan: Berita ini menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Yusril yang menyatakan bahwa

pemerintah menghormati putusan MK yang membatalkan *Presidential Threshold*. Ditekankan bahwa pemerintah akan mengikuti dan menyesuaikan diri dengan putusan tersebut.

2. Sudut Pandang yang Ditampilkan: Sudut pandang pemerintah yang menerima dan menghormati putusan MK, menunjukkan sikap patuh terhadap keputusan lembaga yudikatif.
3. Faktor yang Ditonjolkan: Penekanan pada sikap pemerintah yang menghormati supremasi hukum dan keputusan MK, serta komitmen untuk menyesuaikan kebijakan sesuai dengan putusan tersebut.

d) MK Hapus *Presidential Threshold* 20 Persen, PDIP: Kami

Sepenuhnya Tunduk dan Patuh

1. Fakta yang Ditekankan: Berita ini menyoroti respons Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap penghapusan *Presidential Threshold* 20 persen oleh MK. PDIP menyatakan bahwa mereka sepenuhnya tunduk dan patuh terhadap putusan tersebut.
2. Sudut Pandang yang Ditampilkan: Sudut pandang partai politik, dalam hal ini PDIP, yang menunjukkan kepatuhan dan penerimaan terhadap putusan MK,

meskipun mungkin berdampak pada strategi politik mereka.

3. Faktor yang Ditonjolkan: Penekanan pada sikap PDIP yang patuh terhadap putusan MK, menunjukkan komitmen partai terhadap supremasi hukum dan proses demokrasi.

e) Akademisi UMSU Tanggapi Soal MK Hapus *Presidential*

Threshold

1. Fakta yang Ditekankan: Berita ini menampilkan tanggapan dari akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) terkait penghapusan *Presidential Threshold* oleh MK. Akademisi tersebut memberikan pandangan mengenai dampak dan implikasi dari putusan tersebut terhadap sistem politik dan demokrasi di Indonesia.
2. Sudut Pandang yang Ditampilkan: Sudut pandang akademisi yang memberikan analisis objektif mengenai konsekuensi penghapusan *Presidential Threshold*, baik dari segi positif maupun tantangan yang mungkin muncul.
3. Faktor yang Ditonjolkan: Penekanan pada analisis akademis mengenai dampak penghapusan *Presidential*

Threshold terhadap dinamika politik, representasi partai politik, dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Kesimpulan dari Analisis Framing Media :

Media membingkai berita penghapusan *Presidential Threshold* dengan menekankan aspek keadilan, kesetaraan, dan kepatuhan terhadap hukum. Sudut pandang yang ditampilkan bervariasi, mulai dari perspektif MK, pemerintah, partai politik, hingga akademisi, yang semuanya memberikan pandangan positif atau analitis terhadap putusan tersebut. Faktor-faktor yang ditonjolkan meliputi moralitas, keadilan, kesetaraan hak partai politik, dan dampak terhadap sistem demokrasi, yang semuanya berkontribusi dalam membentuk persepsi publik mengenai penghapusan *Presidential Threshold*.

Berdasarkan hasil penelitian Tribun Medan Online menerbitkan lima berita utama selama Januari 2025 yang membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menghapuskan ambang batas pencalonan presiden (*Presidential Threshold*). Dari aspek sintaktik, struktur berita disusun secara sistematis, dengan judul yang menekankan diksi normatif seperti “langgar moralitas”, “tidak adil”, serta frasa “tunduk dan patuh”, yang mencerminkan gaya bahasa khas media resmi dan netral. Hal ini menunjukkan kecenderungan media untuk menekankan aspek legal-formal dari putusan MK serta tanggapan para pemangku kepentingan terhadapnya.

Dari aspek semantik, terdapat tema dominan dalam pemberitaan, yakni penekanan terhadap keadilan, moralitas, dan hak konstitusional semua partai politik untuk mencalonkan pasangan presiden-wakil presiden. Narasi yang dibangun menunjukkan bahwa penghapusan Presidential Threshold dianggap sebagai langkah progresif menuju demokrasi yang lebih inklusif. Dalam berita seperti “ALASAN MK Hapus Presidential Threshold: Ambang Batas Pencalonan Langgar Moralitas dan Tak Adil”, makna yang disampaikan adalah adanya ketidakadilan sistem sebelumnya yang menguntungkan partai besar dan menyingkirkan partai kecil dari proses pencalonan.

Sementara itu, dari aspek pragmatik, konsekuensi dari simbol dan diksi yang digunakan dalam pemberitaan menunjukkan bahwa media cenderung mendukung narasi pembaruan demokratis melalui penghapusan ambang batas. Dengan mengutip tokoh-tokoh seperti hakim konstitusi, menteri, dan akademisi, media menegaskan legitimasi putusan MK. Kutipan tersebut memperkuat persepsi bahwa keputusan ini perlu diterima semua pihak sebagai upaya memperluas partisipasi politik.

Pola pemberitaan juga menunjukkan framing yang cenderung mendukung keputusan MK. Tiga dari lima berita menampilkan dukungan dari pemerintah, partai besar seperti PDIP, serta kalangan akademisi. Hanya satu berita yang menyinggung potensi dampak negatif dari penghapusan Presidential Threshold, yaitu kerawanan fragmentasi politik. Namun, narasi ini tidak dikembangkan secara mendalam dan hanya

menjadi pengantar terhadap argumen utama tentang pentingnya keadilan dan moralitas.

Secara keseluruhan, melalui analisis isi model Krippendorff, dapat disimpulkan bahwa Tribun Medan Online membingkai isu penghapusan Presidential Threshold 20% dengan kecenderungan yang mendukung putusan MK. Pemberitaan difokuskan pada aspek legal dan etis, dengan penggunaan bahasa yang normatif dan penyusunan narasi yang memperkuat posisi elite politik serta lembaga negara. Meskipun pemberitaan tampak netral secara formal, framing yang muncul cenderung mengabaikan keberagaman opini dari masyarakat umum, sehingga menunjukkan keterbatasan dalam representasi perspektif publik yang lebih luas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap pemberitaan penghapusan *Presidential Threshold* 20% di Tribun Medan Online dengan menggunakan analisis isi model Krippendorff, dapat disimpulkan bahwa struktur berita dalam Tribun Medan Online secara umum menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), implikasi terhadap sistem politik, serta respons dari berbagai pemangku kepentingan. Judul berita cenderung menitikberatkan pada aspek hukum dan moralitas, sedangkan isi berita berfokus pada keabsahan hukum putusan MK serta tanggapan dari pemerintah dan partai politik.

Pola pemberitaan menunjukkan bahwa Tribun Medan Online membingkai isu ini dalam perspektif legalitas dan demokrasi, dengan menampilkan pandangan elite politik dan akademisi sebagai sumber utama informasi. Tiga tema utama yang dominan dalam pemberitaan mencakup putusan MK sebagai langkah hukum yang adil, dampak penghapusan *Presidential Threshold* terhadap dinamika politik, serta sikap pemerintah dan partai politik terhadap putusan tersebut. Gaya bahasa yang digunakan dalam pemberitaan cenderung informatif dan normatif, dengan pemilihan diksi yang menekankan keadilan, moralitas, serta stabilitas politik. Selain itu, nada pemberitaan umumnya netral dan diplomatis, meskipun terdapat

bagian yang bersifat persuasif untuk memperkuat narasi bahwa putusan MK merupakan langkah yang tepat dalam konteks demokrasi.

Framing media dalam Tribun Medan Online lebih banyak menampilkan perspektif Mahkamah Konstitusi, pemerintah, dan partai politik, dengan keterlibatan yang terbatas dari masyarakat umum. Media cenderung membingkai keputusan MK sebagai langkah yang sah dan demokratis, sementara potensi dampak negatif seperti fragmentasi politik hanya disinggung secara sekunder. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Tribun Medan Online lebih menitikberatkan aspek hukum dan politik dalam membingkai isu penghapusan *Presidential Threshold* 20%, dengan fokus utama pada legitimasi putusan MK dan stabilitas politik nasional.

5.2 Saran

Sebelum penulis mengakhiri penulisan skripsi ini, Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan guna kepentingan penelitian selanjutnya yaitu:

1. Penulis mengharapkan liputan yang lebih inklusif akan memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai dampak keputusan politik terhadap masyarakat luas.
2. Penulis menyarankan pemberitaan harus lebih seimbang dengan menyajikan berbagai sudut pandang, termasuk dari pihak yang mendukung maupun yang menentang kebijakan tertentu.

3. Penulis berharap penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan membandingkan framing media yang berbeda untuk memahami perbedaan sudut pandang dan agenda setting masing-masing media.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2018). *Presidential Threshold dalam Pemilu di Indonesia , Perspektif Imam Al-Mawardi TESIS Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam [UIN Sunan Ampel Surabaya].* <https://digilib.uinsa.ac.id/24046/>
- Abra, E. H. (2021). KETIDAKADILAN PRESIDENTIAL TRESHOLDDALAMKONSTITUSIINDONESIA. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3, 98–114.
- Aris Dwi Cahyono. (2021). (Library Research) Peranan Pengembangan Manajemen Kinerja Tenaga Administrasi Kesehatan Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 3(2), 28–42. <https://doi.org/10.53599/jip.v3i2.81>
- Astuti, A., Ginting, R., & Saleh, A. (2021). Strategi Komunikasi Pemasaran iNews TV Sumut dalam Meningkatkan Segmentasi Pemirsa. *PERSEPSI: Communication Journal*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30596/persepsi.v>
- Aziz, A. Y., Budiarti, D., & Istijab, I. (2024). Presidential Threshold Penentuan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Yurijaya : Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1), 34–48. <https://doi.org/10.51213/yurijaya.v6i1.128>
- B Purba, S Gaspersz, M Bisyrri, A Putriana, P. H. (2020). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar.* https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=YkwCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=eDsIrVdb0d&sig=g_TLZYYGmxykb7xJjfvS7jiAn8
- Baskoro, A., & Orang, P. (2017). *PRESIDENTIAL THRESHOLD DI INDONESIA DALAM.* 38–56.
- Effendi, N. N. (2024). *Pesan Dakwah Dalam Film “ Imperfect : Karier , Cinta & Timbangan ” Melalui Platform Youtube (Analisis Isi Klauss Krippendorf).* 16(1), 1–6.
- Effendy, E., Zakaria, Azlisa, & Anggarana. (2023). Dasar Dasar Penulisan Berita. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(2), 4042–4044. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/13888>
- Hajiza, S., & Santoso, P. (2020). Analisis Framing Pemberitaan mediaindonesia . com dan kompas . com Terhadap Berita Puan Maharani Sebagai Bakal Calon Presiden 2024. *Jurnal KESKAP: Jurnal Kesejahteraan Sosial, Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 1(1), 21–29.
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya

- Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39.
<https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694>
- Indriyani, M. (2020). Efektivitas Penggunaan Media Online Tirto.Id terhadap Pemenuhan Kebutuhan Informasi Berita Livi Zheng. *Jurnal Studi Journalistik*, 2(2), 157–167. <https://doi.org/10.15408/jsj.v2i2.15065>
- Majid, A., Sari, A. N., Putra, U. N., & Abdulmajidhknusaputraacid, S. (2023). *Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki*. 6(1), 8–15.
- Ritonga, E. Y. (2018). Teori Agenda Setting dalam Ilmu Komunikasi. *JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study*, 4(1), 32.
<https://doi.org/10.31289/simbollika.v4i1.1460>
- Rustanta, A., Alfani, H., & Yolanda, M. (2022). KONSTRUKSI REALITAS MEDIA ONLINE TERHADAP NAMA IBU KOTA NUSANTARA. *Mediakom : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6(2), 194–206.
<https://doi.org/10.35760/mkm.2022.v6i2.7014>
- Sari, M. (2020). *NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak)
Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. 41–53.
- Ummah, M. S. (2019). Metode Penelitian Kualitatif. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Wilwatikta, H. S., Ramadhani, F., Madya, M., & Pratama, J. (2025). *Efektivitas Sistem Threshold dalam Presidential Threshold di Indonesia*. 1.
- Winda Kustiawan, Ja'far, J., Ali Akbar Siregar, Anggi Martuah Purba, & Mahadir Muhammad. (2022). Manajemen Media Online. *Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Komunikasi*, 2(2), 13–17.
<https://doi.org/10.55606/juitik.v2i2.169>
- Yuningsih, Y., Rustandi, R., Aulia, B., Fuadah, H. H., & Ramdani, S. I. (2023). Analisis Isi Berita Sejarah Ka'bah di Media Massa Serambinews.com. *Mabrur: Academic Journal of Hajj and Umra*, 2(1), 17–32.
<https://doi.org/10.15575/mjhu.v2i1.26552>



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 UIN (U) Cerdas | Terpercaya

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BA-N-PT/Ak.KP/PTN/I/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Muxhtar Basri No. 3 Medan 20230 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 Email: info@umsu.ac.id help@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id umsu@umsu.ac.id

Sk-1

**PERMCHONAN PERSetujuan
 JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth. Bapak/Ibu
 Program Studi Ilmu Komunitas
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 10 Januari 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama Lengkap : IKHWAN AZIZI PURBA
 NPM : 2103110128
 Program Studi : Ilmu Komunitas
 SKS diperoleh : 119 SKS, IP Kumulatif 3,50

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Analisis wacana kritis pada kasus yang palsu di media detik.com	✓
2	Analisis isi berita tentang penghapusan presiden threshold 20% di media tribun medan online.	✓ 10 Jan 2025
3	Analisis wacana pada kasus perembakan bos Rentas mobil di media detik.com	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

- Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 - Daftar Kemajuan Akademik/Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.
- Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih, Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi:
 Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

112.21.311

Medan, tanggal 10 Januari 2025

Ketua

Program Studi.....

(Alatyar Anshori, S.Sosy, M.Hum
 NIDN: 0127048901

Pemohon,

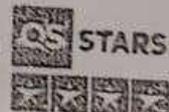
(Signature)

(IKHWAN AZIZI PURBA)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk

Program Studi.....

(Dr. Ribut Priadi)
 NIDN: 0120057303





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mendapat surat ini agar dilakukan
nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisp.umsu.ac.id> fisp@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING
TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)
Nomor : 85/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2025

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor: 1964/SK/IL3.AU/UMSU-03/F/2024 Tanggal 04 Djumadil Awwal 1446H/ 06 November 2024 M Tentang Panduan Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dan Rekomendasi Pimpinan Program Studi Ilmu Komunikasi tertanggal : **10 Januari 2025**, dengan ini menetapkan judul dan pembimbing penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **IKHWAN AZIZI PURBA**
N P M : 2103110128
Program Studi : Ilmu Komunikasi
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2024/2025
Judul Tugas Akhir Mahasiswa : **ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN**
(Skripsi dan Jurnal Ilmiah) **PRESIDENTIAL TRESHOLD 20% DI MEDIA TRIBUN**
MEDAN ONLINE
Pembimbing : **Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos., M.LKom.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) FISIP UMSU Tahun 2024.
2. Penetapan judul dan pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) sesuai dengan nomor yang terdaftar di Program Studi Ilmu Komunikasi: 112.21.311 tahun 2025.
3. Penetapan judul, pembimbing dan naskah Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi dan Jurnal Ilmiah) dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

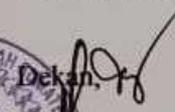
Masa Kadaluarsa tanggal: 10 Juli 2025.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 10 Rajab 1446 H
10 Januari 2025 M



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.


Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH., MSP.
NIDN. 0030017402





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU
 Unggul | Cerdas | Terpercaya
 Bila mendapat surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fslp.umsu.ac.id> ✉ fnlp@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA
(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Kepada Ytu.
 Bapak Dekan FISIP UMSU
 di
 Medan.

Medan, 13. JANUARI 2025

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : IKHWAN AZIZI PURBA
 NPM : 2103110928
 Program Studi : ILMU KOMUNIKASI

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) Nomor: ... 85.../SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2025.. tanggal 10 JANUARI 2025 dengan judul sebagai berikut :

ANALISIS ISI PADA KASUS PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL THRESHOLD
 20% DI MEDIA TRIBUN MEDAN ONLINE

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Permohonan Persetujuan Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK - 1);
2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) (SK-2);
3. DKAM/ Transkrip Nilai Sementara yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Tugas Akhir Mahasiswa;
7. Kartu Kuning Peninjau Seminar Proposal;
8. Semua berkas difotocopy rangkap 1 dan dimasukkan ke dalam MAP berwarna BIRU;
9. Proposal Tugas Akhir Mahasiswa yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3).

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Diketahui oleh Ketua
 Program Studi

Menyetujui
 Pembimbing.

Pemohon,

(AKHYAR ANSHORI S.Sos., M.I.Kom)

(Dr. RIBUT PRADI, S.Sos., M.I.Kom)

(IKHWAN AZIZI PURBA)

NIDN:0127048401

NIDN:0120057303



Agensi Kelayakan Malaysia
 Malaysian Qualification Agency



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 458/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

Program Studi : Ilmu Komunikasi
Hari, Tanggal : Selasa, 18 Februari 2025
Waktu : 08.45 WIB s.d. selesai
Tempat : AULA FISIP UMSU Lt. 2
Pemimpin Seminar : AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.

No.	NAMA MAHASISWA	NO. OR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMPING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
71	HUSNA LATIFUNNISA	2103110035	Dr. MUHAMMAD THARIQ, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. RIBU1 PRIADI, M.I.Kom.	ANALISIS SEMIOTIKA NILAI SARKASME PADA KARIKATUR MALALAH TEMPO EDISI SEPTEMBER 2024
72	MUHAMMAD SAZALI HUSRI	2103110165	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	Dr. IRWAN SYAPI TIG, S.Sos., MAP.	ANALISIS POLA KOMUNIKASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL TRANSPUAN PADA FENOMENA PROSTITUSI ONLINE DI KOTA MEDAN
73	ERIKA EPJANTI SIREGAR	2103110153	AKHYAR ANSHORI, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. ABRAR ADHANI, M.I.Kom.	OPINI MASYARAKAT SIANTAR PADA KOMUNIKASI PEMASARAN SUZUYA MERDEKA MALL TERHADAP MINAT BELI
74	IRHWAN AZZI PURBA	2103110128	Dr. SIGIT HARU YANTO, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. RIBU1 PRIADI, M.I.Kom.	ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL TRESHOLD 20% DI MEDIA TRIBUN MEDAN ONLINE
75	LULFA SARI MATONDAS	2103110263	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos., M.I.Kom.	Assoc. Prof. Dr. PUJI SANTOSO, S.S., M.SP.	ANALISIS SEMIOTIKA SOLIDARITAS DAN PERSAHABATAN GENG 4G PADA EPISODE 7 KILOMETER DI KANAL YOUTUBE HO1 DESIGN

Medan, 18 Syaban 1446 H
17 Februari 2025 M

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
(Assoc. Prof. Dr. ARIFFIN SALEH, MSP.)
Dekan
MOS STARS





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila masyarakat sudah ke ager diked, dan
pemer dan langgan

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XU/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mulhater Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

Website: <https://fisp.umsu.ac.id> Email: fisp@umsu.ac.id Instagram: @umsuamedan Facebook: umsumedan YouTube: umsumedan

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN TUGAS AKHIR MAHASISWA

Nama lengkap : IKHLAN AZIZI PURBA
NPM : 2103110128
Program Studi : Ilmu Komunikasi

Judul Tugas Akhir Mahasiswa (Skripsi Dan Jurnal Ilmiah) : Analisis Isi Berita tentang Penghapusan Presidential Election 20% di media tiktok melalui online

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	10/2/2025	acc judul skripsi	
2.	14/2/2025	Dibimbing awal skripsi deprentir	
3.	21/2/2025	Dibimbing skripsi	
4.	10/3/2025	Bimbingan skripsi BAB I	
5.	13/3/2025	Bimbingan skripsi BAB II	
6.	17/3/2025	Bimbingan skripsi BAB III	
7.	19/3/2025	Bimbingan skripsi BAB IV	
8.	20/3/2025	Bimbingan skripsi BAB V	
9.	21/3/2025	Bimbingan keseluruhan skripsi	
10.	24/3/2025	ACC tugas akhir mahasiswa	

Medan, 24 Maret 2025

Ketua Program Studi,
(Dr. R. R. Pratiwi, S.Sos, M.I. Kom)
NIDN: 0120017402

Pembimbing,
(Dr. R. R. Pratiwi, S.Sos, M.I. Kom)
NIDN: 0120017402

Pembimbing,
(Dr. R. R. Pratiwi, S.Sos, M.I. Kom)
NIDN: 0120017402



Agensi Kelayakan Malaysia
Malaysia Quality Standard Agency

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN TUGAS AKHIR

(SKRIPSI DAN JURNAL ILMIAH)

Nomor : 681/UND/II.3.AU/UMSU-03/F/2025

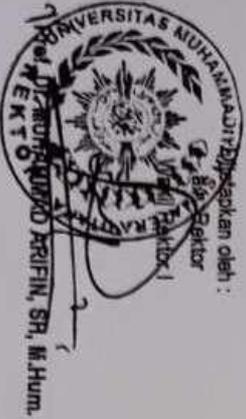


Program Studi : Ilmu Komunikasi
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 April 2025
 Waktu : 08.30 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Aula FISIP UMSU Lt 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJUI I	PENGUJUI II	PENGUJUI III	
41	IKHWAN AZIZI PURBA	2103110128	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom	ANALISIS ISI BERITA TENTANG PENGHAPUSAN PRESIDENTIAL TRESHOLD 20% DI MEDIA TRIBUN MEDAN ONLINE
42	MUHAMMAD RIDHO	2103110109	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom	STRATEGI KOMUNIKASI BUPATI DALAM MENJALANKAN PROGRAM BUAH-G KAMPUNG DI KABUPATEN SIAK
43	NARISYA SHAYNA NASUTION	2103110175	Dr. RIBUT PRIADI, S.Sos, M.I.Kom	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	STRATEGI KOMUNIKASI ORGANISASI MELALUI PROGRAM BANTUAN KEPADA MASYARAKAT MISKIN DI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN
44	SHERLA HAWASTA LESMANA	2103110071	Dr. LUTFI BASIT, S.Sos, M.I.Kom	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	MANAJEMEN KOMUNIKASI DINAS PERTANIAN SUMATERA UTARA MELALUI PROGRAM AKUNTABILITAS PENYAMPAILAN INFORMASI PUBLIK
45	RIANI AMAYDA PUTRI	2103110031	Assoc. Prof. Dr. ARIFIN SALEH, MSP.	Drs. ZULFAHMI, M.I.Kom	AKHYAR ANSHORI, S.Sos, M.I.Kom	PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG RENDAHNYA PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA KOTA MEDAN TAHUN 2024

1. **Notulis Sidang :**



Assoc. Prof. Dr. ABRRAR ADHANI, M.I.Kom



Assoc. Prof. Dr. ABRRAR ADHANI, M.I.Kom

Sekretaris

Medan, 16 Syawal 1446 H
15 April 2025 M



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Ikhwan Azizi Purba
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 1 Desember 2003
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Beringin Gg Perdana No 30, Medan Sunggal, Sumatera Utara
Anak Ke : 3 Dari 3 Bersaudara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Surya Purba
Nama Ibu : Yusriana
Pekerjaan Ayah : Guru
Pekerjaan Ibu : Guru
Alamat : Jl. Beringin Gg Perdana No 30, Medan Sunggal, Sumatera Utara

Pendidikan Formal

Ra : RA Rahmah YPMA
Sd : Pesantren YPMA
Smp : Pesantren YPMA
Smk : SMK Negeri 9 Medan
S1 : Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara